

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Afrizal. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Anto Soemarman. (2005) *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa
- Aria Zurnetti. (2021). *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Depok : Rajawali Perss
- Barda Nawawi Arif. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Kencana
- Bewa Ragawino. (2008). *Pengantar dan Asas Asas Hukum Adat Indonesia*. Bandung
- Chairul Anwar. (1997). *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta : Rineka Cipta
- Cornelis Van Vollenhoven. (1913). *Het Adatrecht van Nederlandsch-indie*, Leiden
- Fence M Wantu. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo : UNG Press
- Hilman Hadikusuma. (1986). *Antropologi Hukum Indonesia*, cet ke 1. Bandung : Alumni
- Hilman Hadikusuma. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Mandar Maju
- Laksanto Utomo. (2017). *Hukum Adat*. Depok : Rajawali Pers
- Suardi Mahyuddin, SH dan Rustam Rahman. (2002). *Hukum Adat Minangkabau dalam Sejarah Perkembangan Nagari Rao-Rao*. Jakarta: CV. Citatama Mandiri
- M. Arif Dt. Bijo Nan Hitam. (2023). *Hukum Pengadilan Adat tentang Penyelesaian Perkara Sengketa Dan Undang-Undang Adat di Nagori Koto Nan Godang Kota Payakumbuh*. Payakumbuh : Fahmi Karya
- Nilma Suryani. (2022). *Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Tindak Pidana Penghinaan*. Depok: Raja Grafindo Persada

- Rizky, Agusta Pinta Kurnia dan Aris Prio Agus Santoso. (2022). *Pengantar Hukum Adat*. Yogyakarta: Pustakabarupress
- R.Soesilo. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Polites
- Soerjono Soekanto. (2005). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* , Cet ke 19 Bandung : Alfabeta
- Suteksi dan Galang Taufani. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok : Rajawali Pers
- Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. Sulawesi: Unimal Press

## **B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-undang Darurat No 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara-acara Pengadilan-pengadilan Sipil
- Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari
- Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat di Nagari
- Undang Undang Nan Duo Puluah

## C. MAKALAH DAN JURNAL

- A.Irzal Rias. (2013). *“Decision Reinforcement of Village Adat Council Institution in Resolving The Disputes Based on Minangkabau Adat Comunity”*, *Academic Research International*, Vol. 4 No. 6. 87
- Elmayanti dan Mukhlis R. 2022. *“Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Konsep Restorative Justice di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau”*, *Riau Law Journal*: Vol. 4, No. 2, November 2022, hlm 213
- Faisal Muhammad Ridho. (2017). *“Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia”*, *Adalah Buletin Hukum dan Keadilan*. Volume 1 Nomor 8e (2017). 79
- Febby. (2023). *“Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Sumbang Salah di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam*. *Ensiklopedia Of Journal*. Vol. 6 No.1 Edisi 1 Oktober 2023
- Nadira Putri Salia. 2023. *“Penerapan Sanksi Adat Minangkabau Oleh Pemangku Adat Terhadap Tindak Pidana Perzinahan di Kenagarian Muaro Kecamatan Sijunjung”*. UIN SUSKA RIAU
- R.Bagus Irawan, Dede Santi Fatimah dan Aryo Fadlian. (2021). *“Analisis Yuridis Penyelesaian Kasus Perzinahan Berdasarkan Hukum Adat Miangkabau dan Hukum Adat Batak”*. *De Juncto Delicti Journal Of Law*. Volume 1 Nomor 1 Tahun 2021. 10
- Satya Dharma. (2021). *Penerapan Sanksi Hukum Adat*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4., Nomor 1 Tahun 2021. 37
- Syamsul Huda. (2015). *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, *Jurnal Studia Islamika*. Vol. 12, No. 2, Desember 2015. 379
- Zaka Firman Aditya. (2019). *Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Huku di Indonesia*. *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 8 No. 1, (2019). 37

#### D. INTERNET

Anugrahdwi, Pengertian, Karakteristik dan Contoh Sistem Hukum Adat, 24 Juni 2023, diakses pada 27 Desember 2023, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/contoh-sistem-hukum-adat/>

Minas Syajidin. “Sejarah Minangkabau”, *Jamberita.com*, (31 Mei 2022), diakses pada tanggal 18 Januari 2024

Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, dalam <http://one.Indoskripsi.com>, Diakses tanggal 11 Januari 2024

Willa Wahyuni, Kedudukan Hukum Pdiana Terhadap Hukum Adat, Hukum Online.com, 18 November 2022, diakses pada 23 Juli 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kedudukan-hukum-adat-terhadap-hukum-pidana-t6376b64d80528>

#### E. WAWANCARA

Wawancara dengan Dt Bijo Nan Hitam, tanggal 22 April 2024 di Warung Kampung Adat Balai Kaliki

Wawancara dengan Dt Mangkuto Nan Putih, tanggal 22 April 2024 di Warung Kampung Adat Balai Kaliki

Wawancara dengan Dt Mangkuto Nan Putih, tanggal 24 April 2024 di Kantor Kerapatan Adat Nagari Koto Nan Gadang

Wawancara dengan Dt Panghulu Rajo Nan Putih, tanggal 25 April 2024 di Kampung Adat Balai Kaliki

Wawancara dengan Arif Rachman Hakim, tanggal 28 April 2024 di Kampung Adat Balai Kaliki

Wawancara dengan 3 orang warga Kampung Adat Balai Kaliki, tanggal 20 April 2024 di Kampung Adat Balai Kaliki

